

ETNIK KONFLIK DAN PERDAMAIAN DI KALIMANTAN TENGAH

Pendahuluan

Konflik etnik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah (Kalteng) terjadi pada Februari 2001. Akhir dari konflik ini lebih merupakan pembantaian dan pengungsian Madura dari Kalimantan Tengah. Korban dan kerugian yang tercatat adalah 469 tewas (utamanya Madura), 1.192 rumah dirusak/terbakar, 6 mobil dirusak, 43 sepeda motor dirusak, dan 114 becak dihancurkan. Konflik ini juga mengakibatkan gelombang pengungsi ke Madura dan Jawa Timur sekitar 70.000-80.000. Walaupun peristiwa konflik utamanya berlangsung sekitar 2 minggu, akibat konflik demikian besar dan hingga sekarang sebagian besar pengungsi di Madura masih belum mendapatkan tempat tinggal tetap.

Penelitian lapangan di Kalteng difokuskan pada Kabupaten Kotawaringin Timur (sebagai wilayah yang paling keras tingkat konfliknya), Palangka Raya (sebagai wilayah sedang), dan Kabupaten Kapuas sebagai wilayah yang rendah tingkat konfliknya. Sebenarnya, peristiwa konflik di Kalteng mengalir dari Sampit (Kotawaringin Timur) pada awal terjadinya, kemudian ke kabupaten lain terutama mengikuti gerak pengungsian (pelarian) Madura ke kabupaten lainnya. Selain itu, Kotawaringin Timur merupakan daerah konsentrasi Madura.

Peristiwa Konflik

Sebelum konflik Februari 2001 sebenarnya telah terjadi konflik Dayak-Madura dalam skala yang kecil. Catatan yang ada menunjukkan terdapat sekitar 12 peristiwa konflik sejak sekitar 1982, yang melibatkan pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Namun sebagian besar peristiwa konflik sebelumnya ini tidak terselesaikan secara tuntas sehingga peristiwa-peristiwa ini dapat dikatakan turut mendorong peristiwa konflik 2001.

Konflik 2001 bermula dari pembunuhan seorang putra tokoh informal Dayak, Sendung, di Kereng Pangipada 16 Desember, 2000. Karena pembunuhan ini warga Dayak menyerang warga Madura sambil mencari pembunuh Sendung yang belum tertangkap. Sejak peristiwa ini terjadi eskalasi ketegangan antara Madura dan Dayak, terutama sejak meledaknya bom di rumah salah seorang warga Madura di Sampit. Warga Dayak beranggapan warga Madura menyimpan bom untuk bersiap perang. Kemudian peristiwa konflik besar merebak pada 17 Februari 2001, ketika sejumlah orang (dicurigai orang Dayak) menyerang rumah seorang warga Madura—6 warga Madura terbunuh—karena mencurigai pembunuh Sendung bersembunyi di rumah tersebut. Karena sebab ini warga Madura kemudian mencari kelompok penyerang di Baamang, Sampit, dan kemudian membakar

sebuah rumah dan selanjutnya berkeliling kota mencari warga Dayak yang terlibat. Hingga waktu tersebut warga Madura mampu “menguasai” Sampit.

Setelah peristiwa ini kemudian konflik tidak terelakan lagi, terutama setelah para “warrior” Dayak dari pedesaan (pedalaman) masuk ke kota Sampit pada 19 Februari. Pada 20 Februari 2001, Sampit sepenuhnya berada dalam kontrol Dayak dan pembantaian terhadap Madura mulai berlangsung. Menghindari pengejaran Dayak, warga Madura kemudian mengungsi ke rumah Bupati, dan kemudian dipindahkan ke kantor Bupati. Dengan inisiatif pejabat setempat guna menghindari pembantaian lebih banyak lagi, pemindahan pengungsi dari Sampit ke Surabaya dan Madura kemudian berlangsung hingga mencapai angka sekitar 70.000 – 80.000 orang.

Sebab Konflik

Banyak analisis menyetujui bahwa terdapat sejumlah sebab yang mendorong terjadinya konflik, antara lain proses marginalisasi ekonomi dan politik penduduk asli (Dayak) oleh pemerintahan Orde Baru yang mengentalkan sentimen lokal. Program transmigrasi, eksploitasi sumber alam (utamanya hutan), hilangnya peran lembaga adat seperti Demang karena UU No. 5/1974, desentralisasi (UU 22/1999) sehingga menghasilkan lokal-sentrisme, serta konflik elit lokal untuk memperebutkan posisi politik dan birokrasi, tidak dapat disangkal kesemuanya mendorong situasi “kerentanan” dan tensi bagi konflik. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai “necessary condition” yang turut mendorong situasi terciptanya konflik.

Namun dari hasil studi lapangan, para informan dan peserta FGD secara tegas menolak jika sebab langsung konflik adalah marginalisasi ekonomi penduduk asli, terutama jika dikaitkan dengan ketimpangan dengan Madura. Sebab langsung yang lebih mereka rasakan adalah benturan budaya antara Madura dan Dayak yang sangat berbeda, manajemen konflik dari aparat yang lemah terutama prevensinya, migrasi Madura yang sangat besar terutama pada tahun-tahun terakhir, serta peristiwa-peristiwa konflik sebelumnya yang tidak terselesaikan (law enforcement lemah). Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa peristiwa konflik etnik di Kalteng merupakan akibat dari sejumlah faktor sebab, baik yang tidak langsung maupun langsung.

Dampak Konflik

Dampak konflik etnik di Kalteng sangat dirasakan justru bukan di wilayah Kalteng. Indikator ekonomi regional di Kalteng, seperti HDI dan HPI menunjukkan bahwa kondisi perbaikan ekonomi terjadi secara kontinum antara sebelum hingga setelah konflik. Hasil studi lapangan melalui survei pendapat subyektif responden menunjukkan bahwa dilihat dari pendapatan, kondisi ekonomi dan peluang kerja, keadaan setelah konflik lebih baik dari sebelum konflik. Keadaan ekonomi terganggu terutama pada sekitar 6 bulan pertama setelah konflik, yakni suplai barang berkurang serta banyak sektor

ekonomi yang ditinggalkan oleh warga Madura, namun hal ini segera dapat diatasi oleh penduduk setempat. Temuan ini menunjukkan dampak ekonomi terhadap wilayah Kalteng terlihat hanya temporer.

Dampak yang lebih signifikan justru akan terlihat di Madura (lihat laporan Madura). Dengan jumlah pengungsi sekitar 70.000 – 80.000 (jumlah pasti tidak tercatat), maka Kabupaten Bangkalan dan Sampang tempat asal migran Madura di Kalteng sangat terbebani. Sebagian besar pengungsi sudah tidak memiliki rumah lagi di Madura, atau tidak memiliki kerabat dekat di Madura, dan mereka merupakan kelompok yang paling terpuak oleh konflik ini. Oleh sebab itu kelompok ini berupaya sebisanya untuk dapat kembali ke Kalteng. Lebih parah lagi, di Madura pun para pengungsi menjadi lahan eksploitasi oknum dan mereka yang terlibat menangani pengungsi.

Dampak lain yang penting adalah pada relasi sosial di Kalteng, yakni segregasi sosial antara warga Madura dan non-Madura, yang setelah konflik terlihat semakin lebar. Warga non-Madura (Dayak dan lainnya) cenderung menyalahkan perilaku Madura atas sebab terjadinya konflik. Oleh sebab itu, kembalinya Madura ke Kalteng dikuatirkan akan memicu konflik berikutnya, karena perilaku ini sangat melekat dengan kultur Madura. Selain itu, terhadap dinamika politik lokal kiranya terjadi secara tidak langsung. Setelah konflik pemekaran beberapa kabupaten dilakukan dan ini agaknya dapat mengadopsi kompetisi dan kepentingan politik elit lokal sekaligus menurunkan tensi konflik. Kehadiran warga Madura mungkin saja tidak terkait langsung dengan kompetisi politik lokal, namun dapat menjadi obyek dan korban dari kompetisi tersebut.

Respon terhadap Konflik

Respon terhadap konflik berkembang bersamaan dengan kebutuhan membangun kembali perdamaian dan pengembalian pengungsi warga Madura. Dari pihak warga Dayak, telah dilangsungkan Kongres Rakyat se-Kalteng di Palangka Raya guna menentukan sikap bersama serta saran penyelesaian. Demikian pula warga Madura, telah menyelenggarakan pertemuan bersama di Batu Malang. Namun dalam “social bargaining” antar etnik ini, “posisi tawar” warga Madura jelas lemah karena mereka “kalah perang” dan cenderung dianggap “bersalah” atas sebab konflik. Keduanya sepakat menjadikan Pemerintah Pusat berperan sebagai penengah (fasilitator perdamaian). Dalam hal peristiwa konflik, warga Madura diminta untuk “meminta maaf” atas sebab konflik dan mereka menerimanya. Namun dalam hal pengembalian pengungsi, warga Dayak masih sulit menerima sekaligus keseluruhan pengungsi karena khawatir terjadi “balas dendam” dan terulang konflik yang sama.

Oleh sebab itu, respons warga Dayak selanjutnya adalah menetapkan beberapa Perda kependudukan berkaitan dengan pengembalian pengungsi Madura dan revitalisasi adat Dayak (Demang), baik Perda tingkat propinsi maupun kabupaten. Beberapa pokok penting dalam Perda ini adalah, hanya

warga Madura yang “baik”, telah tinggal cukup lama di Kalteng serta memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang diperbolehkan kembali ke Kalteng. Revitalisasi adat Demang sebenarnya lebih berkaitan dengan dikeluarkannya UU Otda, namun dengan peristiwa konflik ini semakin menguatkan kebutuhan adanya adat lokal. Fungsi revitalisasi adat adalah agar permasalahan (konflik) pada tingkat komunitas (kecamatan) dapat diselesaikan secara cepat melalui adat lokal, seperti upacara dan denda adat terhadap yang bersalah, selain penyelesaian secara hukum formal. Secara umum, melalui perda kependudukan dan adat, maka pencegahan terhadap konflik dapat dilakukan melalui instrumen demografi dan budaya.

Rekomendasi Umum

Secara umum, beberapa rekomendasi di bawah ini dapat dilakukan guna menyelesaikan dan membangun perdamaian Dayak dan Madura di Kalteng:

Role of institutions:

Koordinasi antar departement/instansi pemerintah sangat penting terutama berkenaan dengan kebijakan pengembalian pengungsi Madura.

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (tokoh) Madura dan Kalteng sangat diperlukan guna membangun pemahaman bersama sekaligus menghindari simpang-siur informasi antara warga Dayak dan Madura.

Penegakan hukum dan penguatan peran sistem dan aparat keamanan sangat vital untuk prevensi dan mengatasi konflik.

Implementasi perda kependudukan dan adat Demang perlu dievaluasi guna melihat efektivitasnya.

Economic inequality:

Kebutuhan bagi pengembangan sumber-daya lokal sangat penting, seperti training untuk petani dan industri kecil guna mengangkat potensi warga lokal.

Penyediaan kredit kecil dan menengah untuk pertanian dan bisnis diperlukan untuk mendorong kemampuan ekonomi lokal.

Perlu kebijakan dan upaya yang dapat menghilangkan monopoli sektor ekonomi oleh etnik tertentu sebagaimana terjadi pada sebelum konflik.

Perlu pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk wilayah terpencil di Kalteng.

Perlu pembangunan infrastruktur air bersih dan listrik, khususnya daerah terpencil, guna memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Social and cultural cohesion:

Perlu pengembangan lembaga penghubung (forum atau asosiasi bersama) lintas etnik, seperti profesi, agama dan antar etnik.

Perlu pertemuan rutin antar tokoh informal, baik antar etnik maupun antar agama, guna membangun pemahaman bersama dan menyelesaikan potensi masalah.

Suport perkawinan antar-etnik (amalgamasi) untuk mengurasi segregasi antar etnik.

Kurangi peran asosiasi etnik (etnik-sentris) dengan memperkuat asosiasi antar etnik.

Human security:

Support program pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan.

Penyediaan pendidikan keterampilan, utamanya bagi penduduk pedesaan.

Penyediaan sarana air bersih dan listrik bagi wilayah pedesaan.

Perlu kebijakan dan lembaga bagi perlindungan wanita dan anak-anak korban konflik.

Perlu dibuka lebih luas akses politik dan ekonomi bagi wanita guna menghilangkan ketimpangan gender.